



Article Informations
Corresponding Email:
frasticaannisa@gmail.com

Received: 11/06/2025; Accepted:
24/08/2025; Published: 15/10/2025

PERAN ASEAN DALAM MENANGANI *HUMAN TRAFFICKING* BERBASIS *ONLINE SCAM* DI INDONESIA TAHUN 2022-2023

Annisa Frastica

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Penipuan lowongan pekerjaan melalui media online yang diawali pada masa pandemi membuat modus kejahatan semakin kompleks. Perdagangan manusia berbasis *online scam* telah membuat masalah baru dalam tatanan kehidupan masyarakat. Indonesia termasuk Negara yang terdampak kejahatan ini dan memerlukan bantuan organisasi regional yaitu ASEAN untuk membantu menuntaskan kejahatan perdagangan manusia di Indonesia. ASEAN memiliki peran dalam penanganan perdagangan manusia berbasis *online scam* dengan dibantu badan yang khusus menangani kasus kejahatan lintas batas Negara yaitu ACTIP dan AICHR. Adapun terdapat pertemuan AMMTC dan SOMTC yang melahirkan deklarasi pencegahan perdagangan manusia pada tahun 2023.

Kata kunci: ASEAN, *Online Scam*, Perdagangan Manusia

Abstract

The job vacancy scam through online media that began during the pandemic has made the crime mode more complex. Human trafficking based on online scams has created new problems in the fabric of society. Indonesia is one of the countries affected by this crime and requires the assistance of a regional organization, namely ASEAN, to help solve human trafficking crimes in Indonesia. ASEAN has a role in handling human trafficking based on online scams with the help of bodies that specifically handle cases of crimes across state borders, namely ACTIP and AICHR. There were AMMTC and SOMTC meetings that gave birth to a declaration on the prevention of human trafficking in 2023.

Keywords: ASEAN, *Online Scam*, Human Trafficking

1. PENDAHULUAN

Perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas Negara yang merugikan masyarakat dan juga mempengaruhi stabilitas Negara. Di dunia

yang serba digital ini, pelaku memanfaatkan banyak sekali platform digital dengan penipuan berupa gaji yang tinggi sehingga korban yang sedang mengalami krisis ekonomi pun akhirnya terbujuk dan menjadi korban perdagangan manusia. Tak jarang mereka yang menjadi korban perdagangan manusia ini mengalami penyiksaan dan sering diancam oleh pelaku bahkan kebutuhan mereka pun sering diabaikan oleh pelaku yang menyandera mereka demi mendapatkan keuntungan pribadi.¹

Online scam adalah kejahatan penipuan yang menggunakan akses digital dengan skema yang dikembangkan oleh pelaku untuk merampas hak korban bahkan data korban dengan tujuan untuk keuntungan pribadi dari pelaku dengan cara memberikan informasi palsu mengenai suatu pekerjaan penipuan dengan harapan mendapatkan korban sebanyak-banyaknya untuk bekerja dengan pelaku dengan waktu kerja diatas jam normal pada umumnya yaitu hingga 16 jam.²

Adapun penyebab dari adanya perdagangan manusia di indonesia ialah dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan yang menjadi fokus indonesia dalam menangani kasus ini. Indonesia mengalami permasalahan terhadap lemahnya penjagaan perbatasan laut, lemahnya penegakan hukum, sumber daya manusia yang masih rendah, kesenjangan sosial, serta perkembangan arus globalisasi yang tidak terkendali menjadi penyebab tingginya kasus kejahatan seperti perdagangan manusia di indonesia. Selain itu, Indonesia mengalami kesenjangan sosial yang sangat terlihat pada saat pembatasan sosial Covid-19. Berbagai ancaman datang pada saat itu termasuk permasalahan terhadap keamanan manusia. Dalam mengatasi kasus ini, Indonesia dan negara anggota ASEAN telah sepakat untuk bekerjasama dalam memberantas kasus perdagangan manusia modus terbaru ini. Adapun upaya yang dilakukan oleh indonesia dalam menangani kasus perdagangan manusia ini ialah dengan meratifikasi protokol palermo

¹ Blue Campaign, "What Is Human Trafficking?" (United States of America, 2022), <https://www.dhs.gov/blue-campaign/what-human-trafficking>.

² Tim multimedia Fakultas Hukum UAJY, "Firtual: Forum Literasi Hukum Dan HAM Digital (Firtual) Dengan Tema Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Melalui Online Scamming," 2023, <https://fh.uajy.ac.id/berita/firtual-forum-literasi-hukum-dan-ham-digital-firtual-dengan-tema-pencegahan-dan-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang-tpo-melalui-online-scamming>.

yang merupakan hasil kesepakatan internasional yang menjadi kebijakan Indonesia dalam menangani kasus ini.³

Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia perlu memperkuat kerjasama antar instansi di dalam maupun bekerjasama dengan ASEAN agar dapat efektif mengatasi kasus tersebut. Diperlukan peran ASEAN sebagai Organisasi kawasan Asia Tenggara yang menjadi penengah diantara permasalahan negara anggota nya. Sebagai Organisasi di kawasan ini, ASEAN menerapkan prinsip tidak ikut campur terhadap urusan negara anggota nya jika tidak diperlukan. Adapun terdapat kerjasama yang dilakukan dalam hal penanganan kejahatan lintas negara yaitu AMMTC (*ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime*) yang menaungi pejabat senior yaitu SOMTC (*ASEAN Senior Official Meeting on Transnational Crime*). AMMTC terbentuk pada tahun 1997 dan merupakan forum setingkat menteri yang ditujukan dalam hal pengambilan kebijakan terkait permasalahan kejahatan lintas negara.⁴

Indonesia sebagai negara yang terdampak kasus ini ikut melakukan kerjasama dengan ASEAN. Bentuk kerjasamanya berupa keikutsertaan Indonesia dalam *Asean Regional Forum* (ARF) dengan mengirimkan perwakilan Indonesia untuk menghadiri forum tersebut dan ikut menanggulangi kejahatan terhadap kemanusiaan dengan ikut meratifikasi ACTIP yang merupakan konvensi yang menentang perdagangan manusia terutama perempuan dan anak melalui UU Nomor 12 Tahun 2017 sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap kejahatan transnasional seperti kasus ini.⁵

Respon ASEAN dalam menanggapi isu ini juga semakin memperkuat kinerja kerjasama dalam hal Hak Asasi Manusia. Kerjasama ASEAN ini didukung dengan AICHR (*ASEAN Intergovernmental Commission on Human Right*) dalam lembaga antar pemerintah ini, Negara-negara di kawasan

³ Anggie Yunda, "Upaya Indonesia Dalam Menanggulangi Kasus Human Trafficking Di Selat Malaka," *Padjajaran Journal of International Relations* 1, no. 3 (2020): 176, <https://doi.org/10.24198/padjir.v1i3.26192>.

⁴ Sekretariat Nasional ASEAN, "Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara," 2017, [https://setnasasean.id/pilar-politik-dan-keamanan#:~:text=Peran ASEAN dalam mencapai stabilitas,\(non-interference\) dalam politik%0A%0A](https://setnasasean.id/pilar-politik-dan-keamanan#:~:text=Peran ASEAN dalam mencapai stabilitas,(non-interference) dalam politik%0A%0A).

⁵ Iskandar Iskandar and Nursiti Nursiti, "Peran Organisasi Internasional Dan Regional Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang Di Indonesia," *Jurnal HAM* 12, no. 3 (2021): 385, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.385-404>.

bersama dengan ASEAN ikut serta dalam melakukan penanganan dan pencegahan terhadap kasus yang melibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia serta mendorong semangat Negara anggota untuk ikut aktif dalam menindak segala jenis kejahatan lintas batas Negara yang mengancam kedaulatan Negara anggota. AICHR terbentuk atas inisiasi dari menteri luar negeri di kawasan Asia Tenggara yang menghadiri konferensi PBB dan mengadopsi konvensi wina sebagai dasar pembentukan lembaga antar pemerintah oleh ASEAN. Untuk mendukung penguatan Hak Asasi Manusia kemudian hal tersebut menjadi tujuan dan prinsip ASEAN yang dituangkan dalam pasal 14 piagam ASEAN sebagai bentuk komitmen dan partisipasi dari Negara anggota dan ASEAN untuk mengedepankan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penanganan kejahatan lintas batas Negara.⁶

Visi ASEAN dituangkan dalam Cetak Biru APSC 2025 yang meliputi aksi untuk mengimplementasi Hak Asasi Manusia sebagai perwujudan dari komitmen Negara anggota kawasan Asia Tenggara. Aksi tersebut memuat gerakan mengajak Negara anggota ASEAN dalam penguatan Hak Asasi Manusia di Negara nya, meyakinkan Negara anggota untuk setuju terhadap pelaksanaan hukum internasional, melaksanakan kerjasama dengan PBB terkait penerapan terhadap isu Hak Asasi Manusia, melakukan dukungan terhadap AICHR dalam melaksanakan tugasnya dan menghormati kebijakan, meningkatkan kesadaran masyarakat ASEAN terhadap isu ini, serta mendorong pertukaran informasi.⁷

2. PEMBAHASAN

2.1. ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATION

Organisasi Regional kawasan Asia Tenggara didirikan pada tahun 1967 yang dinamakan ASEAN (*Assotiation Of Southeast Asian Nation*). Pada awal pembentukannya, terdapat 5 Negara Anggota yang ikut menghadiri Deklarasi Bangkok yang menjadi kesepakatan pendirian ASEAN. Adapun 5 negara

⁶ “Tentang AICHR,” 2023, <https://setnasasean.id/asean-intergovernmental-commission-on-human-rights-aichr>.

⁷ Sekretariat ASEAN Jakarta, *AICHR: Apa Yang Perlu Anda Ketahui – Edisi Ulang Tahun ASEAN Ke-50, Sebuah Ikhtisar*, 2017, https://aichr.org/wp-content/uploads/2020/02/AICHR_What_You_Need_to_Know_Compedium_Indonesia_FINAL_Revised-compressed.pdf.

tersebut meliputi Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Walaupun terdapat kendala sebelumnya karena Filipina tidak ingin menandatangani Deklarasi tersebut namun pada akhirnya Filipina pun mau menandatangani Deklarasi Bangkok dan pada akhirnya ASEAN resmi didirikan. Di dalam Deklarasi Bangkok, terdapat hal-hal yang ditegaskan dalam pembentukan ASEAN yaitu mengenai pendirian ASEAN, penegasan terhadap maksud dan tujuan dari ASEAN, Mekanisme lembaga untuk mencapai tujuan bersama, dan perwujudan dari perdamaian antar Negara anggota di kawasan Asia Tenggara. Melalui Deklarasi Bangkok, terdapat beberapa tujuan didirikannya ASEAN yaitu:

1. Memajukan aspek sosial, ekonomi, dan mengembangkan kebudayaan di regional
2. Mempererat kerjasama antar Negara anggota ASEAN dalam berbagai bidang
3. Memelihara perdamaian dan menjaga stabilitas kawasan
4. Mempererat kerjasama di antara organisasi regional dan internasional lainnya yang telah terbentuk
5. Peningkatan kerjasama yang rutin dalam aspek pendidikan seperti pelatihan dan penelitian di regional ASEAN

Dari tujuan yang terdapat dalam Deklarasi Bangkok ini, terdapat pula prinsip-prinsip dasar yang mendasari sejarah pembentukan ASEAN. Hal yang menjadi prinsip ASEAN ialah seperti saling menghormati antar Negara anggota dalam hal kedaulatan, kebebasan, dan identitas Negara lainnya, tidak ikut campur terhadap urusan dalam negeri Negara lainnya, secepatnya melaksanakan konsultasi sebagai salah satu solusi dalam meredakan konflik, tidak memberikan ancaman terhadap sesama Negara anggota, serta memperkuat keefektivan kerjasama.⁸

Adapun nama dari 'ASEAN' memiliki arti yang mendalam bagi Negara anggota di kawasan Asia Tenggara. ASEAN sangat melekat terhadap harapan Negara anggota nya yang sering disebut juga dengan nama 'Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara'. Harapan yang menjadi dasar dibentuknya

⁸ Prajuli Andhika Wendy, ed., *Memahami ASEAN Sebuah Pengantar*, pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020).

organisasi regional ini adalah mampu menyatukan kekuatan bersama dalam menghadapi ancaman yang dapat memecah belah tujuan serta kepentingan dari Negara anggota di kawasan Asia Tenggara. Ancaman yang datang dari luar diharapkan dapat diatasi oleh ASEAN sebagai penghimpun kekuatan dan sebagai penengah dalam konflik. Seluruh Negara anggota kawasan ini sepakat untuk melindungi nama baik ASEAN dari propaganda politik yang dapat merugikan Negara anggota nya serta mengancam sinergi dan integritas ASEAN dalam bertugas. Propaganda dapat menyebabkan kesalahpahaman antara Negara anggota kawasan dan kemudian akan menghancurkan perdamaian yang telah terjalin antara negara anggota. Oleh sebab itu, propaganda sangat dilarang dalam kawasan Asia Tenggara. Adapun makna dari lambang yang dimiliki ASEAN memiliki arti yang suci seperti dari penggunaan warna. Penggunaan warna biru di lambang ASEAN diartikan sebagai perdamaian dan stabilitas dalam kawasan, warna putih dilambangkan sebagai kesucian, warna merah melambangkan keberanian dan dinamis, sedangkan warna kuning melambangkan suasana makmur yang dimiliki oleh Negara anggota ASEAN. Sedangkan tangkai padi melambangkan harapan dari para pendiri ASEAN yang jumlahnya sama dengan jumlah Negara anggota nya yang terikat terhadap hubungan persahabatan yang terjalin antara sesama Negara anggota di kawasan Asia Tenggara. Bentuk lingkaran diartikan sebagai persatuan ASEAN.⁹ Dengan adanya filosofi yang terdapat dalam lambang ASEAN ini diharapkan dapat menjadi simbol dari kekuatan kawasan Asia Tenggara dan menjadi penguat persahabatan dan perdamaian demi terciptanya stabilitas kawasan yang telah menjadi cita-cita utama dari ASEAN.

Sebagai organisasi lintas kawasan, ASEAN memiliki badan yang bertujuan untuk menangani permasalahan dalam suatu kawasan secara khusus agar lebih terarah. Dalam melaksanakan tugasnya, ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara memerlukan badan khusus yang dapat menangani beberapa isu yang kemudian menjadi fokus permasalahan dan harus ditanggulangi demi mewujudkan tujuan untuk

⁹ Sekretariat Nasional ASEAN, "Portal Utama ASEAN," 2024, <https://asean.org/asean-charter/>.

melindungi kedaulatan dan integritas dari ancaman yang berasal dari luar kawasan. Dalam menanggulangi kasus kejahatan terhadap kemanusiaan seperti halnya perdagangan manusia dan untuk menjaga integritas di kawasan Asia Tenggara, ASEAN memiliki tujuan yang berlandaskan pada pilar politik dan keamanan ASEAN yang kemudian terdapat kerjasama di dalamnya dengan harapan terciptanya perdamaian serta stabilitas di kawasan dalam menghadapi kejahatan terhadap kemanusiaan. Untuk mewujudkan tujuan dari pilar politik-keamanan kemudian didirikanlah badan yang bernama ACTIP (*ASEAN Convention Against Trafficking in Persons*) yang disahkan di Kuala Lumpur, 21 November 2015 dengan tujuan menegakan keadilan dan menegakan hukum dalam kasus perdagangan manusia. ACTIP memiliki tugas khusus dalam perlindungan hak korban yang telah mengancam stabilitas keamanan di kawasan dan juga melindungi korban dan keluarganya untuk terbebas dari tindak perdagangan manusia. Dalam melaksanakan tugasnya, ACTIP bekerja sama dengan instansi pemerintahan yang terdapat di Asia Tenggara maupun organisasi internasional seperti PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk menghimpun kekuatan dalam menanggulangi isu perdagangan manusia di kawasan serta melakukan pertukaran informasi dalam mencari keberadaan pelaku dan korban di berbagai Negara yang diduga terdapat isu perdagangan manusia di regional.

ACTIP juga mengadopsi protokol PBB mengenai kejahatan lintas batas Negara khususnya mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam Resolusi Umum PBB 55/25 dalam hal pencegahan terhadap perdagangan manusia yang dikhususkan untuk perempuan dan anak, memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan, melakukan pencegahan yang efektif dalam menghadapi masalah perdagangan orang, serta memberikan aksi yang signifikan dalam mengurangi angka kasus perdagangan manusia. Protokol ini mulai diadopsi pada 25 Desember 2003 dengan tujuan untuk melindungi hak-hak korban yang terdampak kasus perdagangan manusia, memberikan perlindungan, memberikan kepastian hukum untuk

menghukum pelaku kejahatan, serta menghimpun kerja sama untuk menuntaskan permasalahan kejahatan internasional.¹⁰

ACTIP sebagai badan yang telah dibentuk oleh ASEAN memiliki peranan penting dalam hal menjamin kebebasan Hak Asasi Manusia ini memiliki tujuan utama dalam hal mencegah dan menangani kasus perampasan hak korban untuk mendapatkan kesejahteraan tanpa merasa terancam. ACTIP berperan penting dalam penanggulangan kejahatan internasional dengan menerapkan standar keamanan ASEAN yang tercantum dalam deklarasi yang di dalam penerapan deklarasi itu tercantum mengenai norma anti perdagangan manusia yang diadopsi seperti UNTOC. Lalu terdapat ketentuan tambahan yang diberlakukan oleh ACTIP di dalam konvensi nya yaitu mengenai kendali lintas Negara, yurisdiksi Negara, kerjasama terkait komunikasi antar Negara, serta hukuman yang akan didapatkan oleh pelaku kejahatan jika korban terancam keselamatan dan kesehatannya dengan memberlakukan hukuman yang pantas. ACTIP memiliki identifikasi permasalahan terkait kasus kejahatan perdagangan manusia seperti pencegahan terhadap kasus perdagangan manusia dengan melakukan penguatan terhadap pengambilan kebijakan, melindungi secara penuh korban dari kasus perdagangan manusia, mengadili pelaku dengan seadil-adilnya sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku, serta melakukan kerjasama dalam lingkup regional maupun internasional secara efektif dalam mendukung penumpasan jaringan kejahatan kasus perdagangan manusia. Implementasi yang dilakukan oleh ACTIP ini menunjukkan bahwa ACTIP memiliki kapabilitas yang kuat dalam memerangi kasus perdagangan manusia.¹¹

Selain ACTIP, terdapat AICHR yang juga memiliki peran penting dalam menanggulangi perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara. AICHR dibentuk sebagai bukti dari keseriusan ASEAN dengan cara berkomitmen untuk mempererat kerjasama regional dalam bentuk penguatan solidaritas dari Negara-negara anggota ASEAN dengan tujuan untuk memerangi

¹⁰ UNODC, "Human Trafficking and Migrant Smuggling," n.d., <https://sherloc.unodc.org/>.

¹¹ Afriyansyah Renaldi et.al, "Upaya Asean Dalam Mengatasi Human Trafficking Di Regional Asean (Studi Kasus: Perdagangan Perempuan Dan Anak)," *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Humanoria* Volume 2 (2022): 223–30, <http://www.pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/252/230>.

kejahatan internasional seperti perdagangan manusia dan menciptakan keamanan dalam implementasi Hak Asasi Manusia. Pada awal perkembangannya, badan yang berfokus terhadap Hak Asasi Manusia ini memiliki perjalanan yang panjang hingga akhirnya disahkan secara resmi oleh ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN pada tahun 1993 mengikuti konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengadopsi deklarasi wina yang memiliki fokus kuat terhadap penerapan Hak Asasi Manusia. Pada saat itu, ASEAN mulai menggerakkan fokusnya terhadap perkembangan rezim yang memiliki fokus terhadap Hak Asasi Manusia dalam cakupan kawasan Asia Tenggara. Hingga pada tahun 2007 perlindungan dan kemajuan mengenai Hak Asasi Manusia mengalami perkembangan yang signifikan hal ini dapat dilihat dari penerapan prinsip dan tujuan ASEAN yang tercantum di dalam piagam ASEAN.¹²

Berdasarkan mandat dan fungsi dari AICHR dapat dilihat bahwa penerapan aktivitas maupun hal-hal yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia merupakan tugas utama yang menjadi perhatian utama dari badan yang dibentuk oleh ASEAN. Dalam melaksanakan tugasnya, AICHR dibantu oleh berbagai instansi di dalam kawasan Asia Tenggara maupun organisasi internasional lainnya untuk mendapatkan pertukaran informasi dan kerjasama terkait dengan perlindungan hak-hak korban dan juga mengenai solusi yang dapat diambil sebagai langkah yang tepat dalam mengatasi kasus yang berkaitan secara langsung terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia. Negara-negara ASEAN juga berperan aktif dalam penanggulangan pelanggaran Hak Asasi manusia di dalam kawasan.¹³

Dalam melaksanakan amanatnya, AICHR telah menerapkan mekanisme pelanggaran HAM di ASEAN yang diatur dalam protokol piagam ASEAN tentang mekanisme penyelesaian sengketa disepakati pada tanggal 8 April 2010 di Hanoi. Protokol yang telah disepakati bersama ini telah menjadi landasan hukum dalam penyelesaian berbagai isu yang mengakibatkan permasalahan serius di antara Negara-negara anggota di dalam kawasan mengenai isu Hak Asasi Manusia. Penyelesaian sengketa ini merupakan

¹² AICHR, "About AICHR Structure, Work and History of the AICHR," n.d., <https://aichr.org/about-aichr-2/>.

¹³ Jakarta, AICHR: Apa Yang Perlu Anda Ketahui – Edisi Ulang Tahun ASEAN Ke-50, Sebuah Ikhtisar.

tugas yang telah menjadi amanat bagi AICHR untuk ditindaklanjuti demi menciptakan perdamaian dan ketentraman di dalam kawasan. Adapun penegakan hukum yang dapat digunakan yaitu hukum internasional mengenai pasal yang mengatur mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia maupun penggunaan penegakan hukum terkait pasal yang mengatur mengenai pelanggaran HAM yang terdapat di dalam hukum Regional ASEAN. Penyelesaian sengketa dapat dipandu oleh AICHR sebagai badan yang bertanggung jawab dalam mengatasi permasalahan Hak Asasi Manusia di dalam kawasan Asia Tenggara.¹⁴

Indonesia merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang terdampak kasus perdagangan manusia. Untuk menuntaskan kejahatan perdagangan manusia, dibutuhkan kerjasama yang efektif dalam penanganannya. Indonesia tidak dapat bekerja sendiri sehingga masih memerlukan bantuan dari pihak luar untuk membantu menyelesaikan permasalahan di Indonesia. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Indonesia mengalami masalah perdagangan manusia yang serius hingga mencapai 605 kasus pada tahun 2012-2015. Pemerintah Indonesia telah berupaya melakukan berbagai aksi seperti melakukan rehabilitasi secara sosial maupun medis, melakukan pencegahan dengan cara melaksanakan kampanye terkait bahaya perdagangan manusia, serta melakukan pendampingan terhadap korban melalui PMI maupun pihak ketiga. Dalam menindaklanjuti hal ini, ASEAN melakukan aksi yang didampingi oleh ACTIP untuk menghimpun dukungan dari berbagai negara di Asia Tenggara yang terdampak dengan cara meratifikasi peraturan ACTIP ke dalam hukum domestik. ASEAN terus menghimpun kerjasama dengan Indonesia dengan melakukan kampanye pencegahan, memperkuat kerjasama operasional antar negara anggota, meningkatkan upaya penyelidikan di berbagai negara, dan melakukan inovasi terhadap prosedur keselamatan korban.¹⁵

¹⁴ Ibid

¹⁵ Nurul Fajriah, "Peran ASEAN Dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia Di Kawasan Asia Tenggara," 2022, 15.

2.2. KASUS HUMAN TRAFFICKING BERBASIS ONLINE SCAM DI INDONESIA TAHUN 2022-2023

Pada tahun 2021, kasus perdagangan manusia semakin menyebar ke berbagai penjuru kawasan Asia Tenggara. Banyak dari korban yang terdampak merupakan warga Negara dari Myanmar, Kamboja, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Korban perdagangan manusia tersebut semakin meluas akibat jaringan organisasi kriminal yang mendapatkan akses terhadap sistem informasi dan komunikasi yang semakin canggih dan kompleks sehingga membingungkan aparat pemerintah dalam menemukan korban dan menindak pelaku kejahatan perdagangan manusia secara hukum. Pada tahun 2022, kasus perdagangan manusia berbasis *online scam* mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini kemudian menjadi ancaman di dalam kawasan Asia Tenggara karena telah menyebar luas dan mengganggu kedaulatan Negara-negara yang terdapat di dalam kawasan. Perdagangan manusia berbasis *online scam* ini telah mengakibatkan krisis regional dan juga membahayakan keselamatan korban. Korban terbanyak yang menjadi incaran pelaku perdagangan manusia ialah berasal dari tingkat pendidikan yang tinggi karena dibutuhkan kemampuan berbahasa asing yang baik dan juga kemampuan menggunakan teknologi sehingga mampu bekerja sesuai dengan keinginan pelaku. Perkembangan kasus kejahatan ini kemudian semakin berkembang dan mulai meningkat resiko dan bahaya terhadap stabilitas Negara.¹⁶

Hingga pada tahun 2023, kasus perdagangan manusia belum selesai sepenuhnya walaupun pelaku kejahatan telah ditangkap dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Kasus perdagangan manusia berbasis *online scam* ini belum menemui titik terang terungkapnya korban beserta

¹⁶ Narin Sun, "Dunia Desak Kamboja Benahi Kasus Perdagangan Manusia Dan Penipuan Jaringan China China," 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/dunia-desak-kamboja-benahi-kasus-perdagangan-manusia-dan-penipuan-jaringan-china/6734505.html>.

jumlahnya yang mengakibatkan banyak dari korban belum ditemukan dan juga kasus ini belum bisa diungkap sepenuhnya. Hal ini mengakibatkan ASEAN mengalami kesulitan dalam hal menangani kasus perdagangan manusia yang diakibatkan oleh kurangnya kebijakan yang efektif dalam menangani kasus untuk mengungkap identitas korban perdagangan manusia berbasis *online scam* yang telah menyebar ke seluruh Asia Tenggara dan bahkan berada di luar jangkauan kawasan. Korban juga mengalami mutasi dari Negara asal korban bekerja seperti contohnya dari Myanmar ke Thailand untuk kemudian dijual kembali. Hal tersebut sering terjadi terhadap warga Negara yang berasal dari berbagai Negara yang terdapat di wilayah Asia Tenggara. Akibatnya, korban perdagangan manusia sulit untuk dilacak keberadaannya oleh pemerintah maupun Negara yang terdampak lainnya. Hingga pada akhirnya diselenggarakannya KTT ASEAN di Labuan Bajo pada tahun 2023 yang di dalam konferensi tersebut Indonesia dan Negara-negara yang terdapat di Asia Tenggara menyatakan perang terhadap perdagangan manusia imbas dari penyalahgunaan Teknologi yang terdapat di dalam kawasan.¹⁷

Dalam konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yang ke-42 ini Presiden Republik Indonesia yaitu presiden Jokowi menyampaikan urgensi dari kasus perdagangan manusia ini ialah karena korban yang terjerat oleh kasus ini telah banyak sehingga mengakibatkan krisis kemanusiaan dan keamanan manusia yang dimana telah banyak pelanggaran mengenai Hak Asasi manusia di kawasan Asia Tenggara sehingga kasus ini perlu menjadi perhatian penting masyarakat ASEAN dalam menghadapi kasus ini. Pada akhirnya, deklarasi ini kemudian mendapatkan kesepakatan antar petinggi ASEAN untuk memperkuat kerjasama lewat latihan dan operasi TPPO, pertukaran informasi, pengumpulan bukti dan perolehan data korban, serta mendeteksi hingga mengadili pelaku kejahatan *online scam*.¹⁸

¹⁷ BBC News Indonesia, “Kami Harus Menunggu Berapa Tahun Lagi Untuk Pulang?” - WNI Korban Perdagangan Orang Menanti Langkah Konkret ASEAN,” 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c6pw3ddl12o>.

¹⁸ Budiono Eko, “Urgensi ASEAN Berantas Perdagangan Manusia,” 11 Mei 2023, <https://www.infopublik.id/kategori/asean-2023/739262/urgensi-asean-berantas-perdagangan-manusia>.

Namun, dalam aksi nyata nya terjadi perbedaan terhadap karakteristik mengenai pola tingkah pelaku, korban, hingga perubahan perekrutan yang menyulitkan ASEAN dalam mencari informasi mengenai pola kejahatan nya. Pada saat korban sampai di negara tujuan, mereka kemudian disekap untuk melakukan modus penipuan kembali kepada calon korban karena pelaku mengetahui kemampuan korban dalam berkomunikasi dengan bahasa asing yang dapat memudahkan pelaku dalam melakukan pencarian selanjutnya. Hal ini menyebabkan korban dapat beralih menjadi pelaku penipuan.¹⁹

Urgensi yang menjadi perhatian dari ASEAN untuk Indonesia ialah Keamanan dari WNI yang menjadi korban. Pelayanan terkait laporan dari WNI yang menjadi korban dari perdagangan manusia berbasis *online scam* di KBRI terdekat masih kurang responsif. Semakin banyaknya laporan yang masuk ke KBRI mengenai kasus ini, menimbulkan banyaknya kekecewaan dari WNI karena mereka belum mendapatkan informasi mengenai waktu kepulangan mereka dan juga mendapatkan kabar terkait dengan kepastian pembebasan mereka dari ancaman pelaku kejahatan perdagangan manusia.²⁰

Terjadinya perkembangan terhadap kasus perdagangan manusia berbasis *online scam* tentu nya didasarkan terhadap faktor-faktor pendukung yang mengakibatkan kasus tersebut menjadi semakin berkembang walaupun telah dilakukan nya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat Indonesia yang sebagian besar memanfaatkan media sosial dalam keseharian nya seringkali mengabaikan himbauan pemerintah terkait memfilter informasi di media sosial yang dapat dipercaya maupun tidak dapat dipercaya data nya. Kejahatan sering dapat terjadi karena kurangnya pengamanan sistem informasi dan komunikasi yang menyebabkan data masyarakat yang menjadi korban dengan mudah terbongkar dan dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Akses internet yang bebas juga menjadi alasan terhadap kasus ini karena setiap orang maupun pelaku kejahatan

¹⁹ Pramudyani Difa, "Urgensi ASEAN Berantas Perdagangan Manusia Dalam Kasus 'Online Scams,'" 2023, <https://www.antaranews.com/berita/3531606/urgensi-asean-berantas-perdagangan-manusia-dalam-kasus-online-scams>.

²⁰ "Kami Harus Menunggu Berapa Tahun Lagi Untuk Pulang?" - WNI Korban Perdagangan Orang Menanti Langkah Konkret ASEAN," 2023, [https://www.bbc.com/indonesia/articles/c6pw3dd1nl2o#:~:text=ASEAN "seperti macam kertas",dan investasi bodong di Kamboja](https://www.bbc.com/indonesia/articles/c6pw3dd1nl2o#:~:text=ASEAN%20%22seperti%20macam%20kertas%22,dan%20investasi%20bodong%20di%20Kamboja).

dapat dengan bebas mengakses segala jenis informasi tanpa diketahui. Kekacauan yang ditimbulkan oleh aksi pelaku kejahatan ini tidak menimbulkan permasalahan yang dapat dilihat secara umum seperti kasus pencurian, narkoba, dan kasus nyata lainnya sehingga hal tersebut sulit untuk dilacak keberadaannya. Hal ini menyebabkan semakin samarnya jarak dan keberadaan dari pelaku dan korban.²¹

Adapun faktor penyebab lainnya dari berkembangnya kasus perdagangan manusia berbasis *online scam* ini didasari oleh faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan hal yang utama seseorang maupun masyarakat dengan mudahnya tergiur untuk melamar pekerjaan yang belum terbukti legalitas dan kredibilitasnya. Perekonomian yang tidak stabil dan banyaknya tuntutan biaya hidup menjadikan masyarakat gelap mata dan cenderung tidak memperhatikan bahaya yang dapat mengancam nyawa serta kebebasannya. Menindak lanjuti hal ini, masyarakat dan pemerintah sering berbeda pandangan. Masyarakat menuntut pemerintah untuk berupaya memperluas lapangan pekerjaan agar persaingan di dunia pekerjaan adil dan sama rata. Dengan terbatasnya lapangan pekerjaan, hal ini membuat tingkat kemiskinan semakin marak terjadi dan merugikan masyarakat.

Tingkat kemiskinan yang tinggi menyebabkan terjadinya kesenjangan terhadap kesejahteraan sosial yang mengakibatkan adanya perbedaan drastis yang timbul di lingkungan masyarakat diakibatkan oleh dampak dari kesenjangan sosial yang terjadi. Peningkatan kebutuhan yang tinggi mengakibatkan banyak masyarakat yang terpuruk akibat perekonomian yang tidak stabil dan juga kurangnya perhatian pemerintah untuk segera mencari solusi terkait penanggulangan kemiskinan yang terjadi. Kebutuhan hidup di masing-masing daerah juga mengalami perbedaan sehingga masyarakat harus mampu bertahan dengan kondisi tersebut.²² Terdapat faktor lainnya yang mempengaruhi berkembangnya kasus ini yaitu terdapat kendala dalam hal ketersediaan pelayanan dan fasilitas yang mendukung

²¹ Warangani Arundati, "Ini 3 Faktor Yang Menjadi Penyebab Kejahatan Siber Mudah Terjadi," 2021, <https://www.cloudcomputing.id/berita/3-faktor-penyebab-kejahatan-siber>.

²² Bab IV, "Laporan Penipuan Jual Beli Online Yogyakarta," *Respositori UMY*, 2017, http://repository.umi.ac.id/bitstream/handle/123456789/23084/BAB_IV.pdf?sequence=8&isAllowed=y.

dalam penanganan kasus ini. Keterbatasan ini membuat kasus perdagangan manusia berbasis *online scam* terkendala.

Kasus ini memberikan dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Kasus yang menyebabkan banyaknya korban yang di perdagangkan hingga ke luar negeri memberikan dampak psikis yang dirasakan oleh korban. Dampak psikis ini kemudian perlu di tangani oleh pihak yang berwajib untuk mendapatkan solusi dari permasalahan mental korban. Penyiksaan dan segala bentuk ancaman yang didapatkan oleh pelaku mengakibatkan korban mengalami serangan mental yang membuat korban sulit untuk memberikan keterangan terkait modus, mobilitas pelaku, serta kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Dampak psikis mengakibatkan korban sulit dalam menjalankan aktivitas nya sehari-hari karena masih terbayang dengan perlakuan yang di dapatkan dari pelaku. Korban yang tidak segera ditangani setelah selesai diamankan oleh petugas memiliki kemungkinan yang tinggi untuk mencelakai diri sendiri. Angka depresi akibat tekanan psikis yang dialami oleh korban juga terdapat indikasi bunuh diri akibat trauma yang dialami. Selain itu, untuk mengobati rasa sakit dan cemasnya, korban sering menggunakan narkoba untuk mengatasi gejala dari penyakit mental yang diakibatkan oleh trauma yang dialami nya.²³

Dampak yang ditimbulkan akibat kasus ini seperti kesulitan yang dialami oleh korban untuk membangun rasa kepercayaan terhadap sesama. Stress dan trauma yang dihadapi oleh korban selama diperdagangkan mengakibatkan korban mengalami kondisi yang sulit dalam hal mempercayai sesama. Kebaikan dan perhatian yang diberikan oleh sesama dalam hal untuk mengobati trauma korban dianggap sebagai penipuan yang akan dirasakan kembali oleh korban. Oleh sebab itu, korban dari perdagangan manusia sangat berhati-hati terhadap hal yang ingin diberikan kepada mereka karena terdapat perasaan khawatir bahwa mereka akan

²³ Pyramid Healthcare, "Dampak Perdagangan Manusia Terhadap Kesehatan Mental Dan Fisik," 2024, <https://www.pyramid-healthcare.com/the-mental-and-physical-health-effects-of-human-trafficking/>.

mendapatkan penyiksaan dan perlakuan yang sama seperti yang pernah mereka alami selama diperdagangkan oleh pelaku kejahatan.

2.3. PERAN ASEAN DALAM MENGATASI KASUS HUMAN TRAFFICKING BERBASIS ONLINE SCAM DI INDONESIA TAHUN 2022-2023

ASEAN SEBAGAI INSTRUMEN

Pada tahun 2023, dialog mengenai HAM terus berlanjut pada pertemuan ke-37 AICHR di Bali pada Mei 2023. Pada pertemuan tersebut, terdapat agenda Indonesia yaitu *ASEAN 2023 on ASEAN Matters: Epicentrum of Growth*. Dalam pembahasan tersebut difokuskan terhadap penguatan peran AICHR dalam melakukan perlindungan dan memajukan HAM melalui dialog yang telah diselenggarakan tersebut. AICHR berperan dalam memperkuat kerjasama dan menyatukan pemikiran antar negara anggota dalam menghadapi tantangan permasalahan kejahatan transnasional khususnya perdagangan manusia yang telah berkembang modus penipuannya dalam hal penyalahgunaan teknologi. Peran AICHR dalam mempromosikan kelancaran dalam penegakan hak asasi manusia melalui dialog dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat ASEAN ataupun melalui berbagai forum internasional merupakan bukti bahwa penguatan kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan perkembangan kejahatan transnasional harus dihadapi bersama. Melalui Forum Lembaga HAM Nasional Asia Tenggara (SEANF), AICHR bertemu dengan enam lembaga yaitu (KOMNAS HAM), Malaysia (SUHAKAM), Myanmar (MNHRC), Filipina (CHRP), Thailand (NHRCT), dan *Provedoria dos Direitos Humanos e Justica* (PDHJ) Timor-Leste. Adapun pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka diskusi dengan berfokus terhadap strategi yang diambil dalam menegakan HAM di kawasan Asia Tenggara. Pertemuan ini merupakan pertemuan yang dihadiri oleh Indonesia pertama kali. ASEAN berperan dalam menyatukan pemikiran melalui badan HAM yaitu AICHR dalam memberantas aksi kejahatan berupa perdagangan manusia yang berbasis *online scam* dengan mengadakan

pertemuan dengan masing-masing badan nasional dari negara anggota yang tergabung dalam kawasan Asia Tenggara.²⁴

Selain pertemuan di forum HAM dari berbagai badan nasional negara anggota di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menjadi tuan rumah pada KTT ASEAN ke-42 tahun 2023. Dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut, terdapat pembahasan mengenai penguatan HAM dalam mencegah kasus perdagangan manusia dengan efektif. ASEAN berperan dalam menghimpun kekuatan dari negara-negara anggota untuk ikut berpartisipasi aktif dalam menyusun rencana pemberantasan kejahatan perdagangan manusia. Pada tahun 2022-2023 diketahui bahwa modus perdagangan manusia berbasis penipuan melalui teknologi canggih semakin berkembang dan menyulitkan negara anggota dalam melawan kejahatan tersebut karena terkendala oleh keterbatasan akses teknologi. KTT ASEAN tersebut berperan dalam memberikan kepastian keamanan bagi seluruh masyarakat ASEAN yang menjadi korban dari perdagangan manusia tersebut. ASEAN juga ikut berperan dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan korban melalui badan pertemuan KTT, badan nasional HAM masing-masing negara anggota, dan melakukan koordinasi setingkat menteri seperti AMMTC maupun SOMTC.²⁵

Indonesia menjadi ketua pertemuan KTT ASEAN ke-42 yang diselenggarakan di Labuan Bajo. Pada pertemuan tersebut, Presiden Republik Indonesia menyatakan bahwa perdagangan manusia berbasis teknologi perlu ditindak lanjuti bersama mengenai penanganannya karena masih kurangnya akses terhadap teknologi canggih untuk mendeteksi keberadaan korban perdagangan manusia yang terlibat dalam kasus *online scam*. Dalam pertemuan tersebut menghasilkan *Declaration on Combating Trafficking in Persons Caused by the Abuse of Technology*. ASEAN sebagai organisasi di kawasan Asia Tenggara berperan sebagai wadah dalam

²⁴ Antara News, "Indonesia Akan Pimpin Diskusi HAM Dalam Pertemuan Ke-37 AICHR," 2023, [https://www.antaraneews.com/berita/3547842/indonesia-akan-pimpin-diskusi-ham-dalam-pertemuan-ke-37-aichr#:~:text=Jakarta \(ANTARA\) - Indonesia akan memimpin Pertemuan,Indonesia akan memimpin pembahasan penguatan peran AICHR.](https://www.antaraneews.com/berita/3547842/indonesia-akan-pimpin-diskusi-ham-dalam-pertemuan-ke-37-aichr#:~:text=Jakarta (ANTARA) - Indonesia akan memimpin Pertemuan,Indonesia akan memimpin pembahasan penguatan peran AICHR.)

²⁵ Humas Kemensetneg RI, "Indonesia Dorong Penguatan Menyeluruh Penanggulangan Perdagangan Orang Di KTT ASEAN 2023," 2023, https://www.setneg.go.id/baca/index/indonesia_dorong_penguatan_menyeluruh_penanggulangan_perdagangan_orang_di_ktt_ke_42_asean_2023.

menghimpun kerjasama antar negara anggota ASEAN dalam menangani kasus perdagangan manusia berbasis *online scam*. Selain itu, peran ASEAN dalam deklarasi ini adalah membentuk mekanisme regional yang efektif dalam menangani kasus perdagangan manusia berbasis *online scam*. Mekanisme regional merupakan sistem yang dibentuk untuk mengendalikan norma-norma HAM dan prosedur pengambilan keputusan di tingkat regional. Penerapan mekanisme HAM ini memberikan keuntungan seperti dapat melindungi HAM dan memberikan kerangka kerjasama yang baik terhadap penanganan dan penegakan HAM di Asia Tenggara.²⁶

ASEAN SEBAGAI ARENA

Pertemuan AMMTC yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu pertemuan AMMTC ke-16 pada tanggal 21 September 2022 dan pertemuan berlangsung melalui *video conference* yang dihadiri oleh pemangku kepentingan seperti perwakilan dari instansi POLRI dan para menteri yang terlibat. Pada pertemuan melalui *video conference* tersebut, dihasilkan joint statement yang diberi tema *ASEAN A.C.T.: Addressing Challenges Together*. Pertemuan ini dipimpin oleh Kerajaan Kamboja konferensi ini membahas mengenai cara hingga langkah-langkah untuk memperkuat kerja sama regional dalam memerangi kejahatan lintas negara, berfokus terhadap menghadapi tantangan pasca-pandemi COVID-19. Pertemuan ini membahas mengenai penyalahgunaan teknologi dalam perdagangan manusia. AMMTC memegang peranan penting dalam keberhasilan terselenggaranya dialog kerjasama dalam hal menangani berbagai kasus kejahatan transnasional termasuk perdagangan manusia berbasis *online scam*. Dalam konferensi tersebut dihasilkan joint statement berupa pertukaran pandangan hingga menegaskan komitmen dari negara-negara untuk memperkuat kerjasama dalam melaksanakan Rencana Aksi ASEAN (PoA) untuk Memerangi Kejahatan Lintas Negara 2016-2025.²⁷

²⁶ Kuldeep Singh Chauhan, "ASEAN Leaders Tackle Human Trafficking at Latest Summit," 2023, <https://thediplomat-com.translate.googleusercontent.com/2023/05/asean-leaders-tackle-human-trafficking-at-latest-summit/> Untuk memastikan implementasi yang efektif, teknologi dalam konteks perdagangan manusia.

²⁷ ASEAN Secretariat Team, "Pernyataan Bersama Pada Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN Ke-16 Tentang Kejahatan Transnasional (AMMTC Ke-16)," *Website Resmi Sekretariat ASEAN*, no. September (2022): 1-3, <https://asean.org/joint-statement-sixteenth-asean-ministerial-meeting-on-transnational-crime-16th-ammtc/>.

Pada tanggal 20-23 Agustus 2023 Indonesia memegang keketuaan dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi yang dilaksanakan di Labuan Bajo. Keketuaan Indonesia dalam KTT juga berkaitan dengan pertemuan AMMTC ke-17. Pada tahun tersebut, Indonesia memiliki peranan penting dalam memimpin upaya terkait penanganan kejahatan transnasional di kawasan. Melalui kepemimpinan Indonesia dalam pertemuan AMMTC, peran kerjasama antar negara anggota ASEAN terus terjadi peningkatan terutama dalam memperkuat pengembangan kebijakan yang efektif bagi sesama negara anggota. AMMTC berperan dalam memastikan kelancaran terhadap terselenggaranya penerapan hal-hal penting dan juga memastikan penerapan deklarasi yang akan disepakati bersama dalam memerangi perdagangan manusia.²⁸

Peran SOMTC pada tahun 2023 tercermin lewat *working plan* yang telah diadakan. SOMTC berperan dalam memastikan terwujudnya implementasi yang diselenggarakan melalui *working group*. Selain itu, SOMTC berperan dalam menjalankan amanat dari prinsip yang dipegang oleh *working plan* sebagai implementasi dari prinsip ACTIP dan APA serta prinsip yang lainnya seperti Piagam ASEAN, Cetak Biru Komunitas Politik-Kemampuan ASEAN 2025, Rencana Aksi ASEAN dalam Memerangi Kejahatan Transnasional, Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir dan Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak. *Working group* SOMTC berperan dalam memantau pelaksanaan kerja dari *Bohol work plan 2.0* dan berperan dalam menerima dan menyatukan laporan berkala hingga tahunan dari Badan Sektoral ASEAN dan seluruh Negara Anggota ASEAN (melalui Perwakilan ACTIP Nasional masing-masing), Sekretariat ASEAN dan/atau mekanisme nasional lainnya) yang berpartisipasi dalam Rencana Kerja ini. Selain itu, SOMTC berperan sebagai wadah diskusi serta pertukaran informasi yang terjalin antara Negara anggota ASEAN dalam hal kerjasama lewat *working plan* yang

²⁸ NCB Interpol Indonesia, "ASEAN MINISTERIAL MEETING ON TRANSNATIONAL CRIME (AMMTC) KE-17," 2023, <https://interpol.go.id/berita38.php#:~:text=Sebagai pemegang keketuaan ASEAN tahun,atau lintas negara di Kawasan.>

terdapat dalam *Bohol work plan 2.0*. SOMTC memiliki peran dalam melakukan analisis mengenai laporan berkala dari badan sektoral ASEAN seperti ACTIP maupun badan sektoral lainnya dalam hal penanganan kasus perdagangan manusia termasuk di Indonesia.²⁹

ASEAN SEBAGAI AKTOR INDEPENDEN

Program kerja yang dilaksanakan pada tahun 2022-2024 merupakan program kerja berkelanjutan yang telah diperpanjang melalui kesepakatan dalam pertemuan SOMTC. Program kerja ini termasuk dalam pengembangan dari program kerja SOMTC tahun 2019-2021. Program kerja tersebut terus dikembangkan setiap tahun nya sebagai cerminan dari implementasi rencana aksi ASEAN dalam memerangi kejahatan transnasional yang terdapat di kawasan Asia Tenggara. Tujuan diadakan nya program tersebut sejalan dengan peran dan tanggungjawab ASEAN dalam mengambil kebijakan dan melakukan kegiatan yang efektif untuk memberantas kasus kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia. Adapun kebijakan yang diambil berkaitan dengan fokus ASEAN terhadap pengambilan kebijakan yang menyeluruh dari ACTIP nasional, penanganan terhadap korban eksploitasi terutama perempuan dan anak yang sering menjadi target dalam perdagangan manusia, fokus terhadap peningkatan kapasitas strategi yang efektif untuk aksi penanganan kejahatan perdagangan manusia, kemudian dalam konteks pengambilan tindakan akibat pandemi yang telah melanda dunia.³⁰

ASEAN Plan Of Action to Combat Transnasional Crime termasuk dalam deklarasi yang menghubungkan negara anggota ASEAN untuk bersama menyatukan pikiran dengan melaksanakan kerjasama antar negara anggota nya dengan tujuan dapat memberantas kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia. Dengan adanya gangguan seperti kejahatan transnasional ini membuat masalah baru di setiap negara anggota ASEAN yaitu permasalahan terhadap gangguan keamanan yang mengakibatkan kedaulatan negara anggota terganggu. Kejahatan terhadap kemanusiaan ini

²⁹ Ibid.

³⁰ Sekretariat Nasional ASEAN, "THE ASEAN SENIOR OFFICIALS MEETING ON TRANSNATIONAL CRIME (SOMTC) WORK PROGRAMME TO IMPLEMENT", September 2022

kemudian semakin kompleks baik dari modus maupun perbedaan penanganan yang membuat banyak negara kesulitan mengatasinya di ruang lingkup domestiknya sendiri. ASEAN berperan dalam memberikan keyakinan terhadap para negara anggota untuk terus maju melawan segala bentuk ancaman seperti perdagangan manusia. Dalam deklarasi ini, terdapat bentuk kerjasama yang dilakukan oleh para negara anggota yaitu berkaitan dengan pertukaran informasi tentang pemberlakuan hukum yang efektif dan aturan yang berlaku di masing-masing negara untuk bertukar pikiran dan membuka wawasan mengenai kepatuhan terhadap hukum. ASEAN memiliki peranan penting dalam menjaga keselamatan masyarakat ASEAN melalui kesepakatan kebijakan yang tertera dalam deklarasi agar seluruh negara anggota mematuhi dan tidak menimbulkan salah paham antar sesama.³¹

Sejalan dengan prinsip yang dipegang teguh oleh ASEAN, terdapat bagian-bagian dari ASEAN yang ikut berperan dalam mencapai prinsipnya. ACTIP (*ASEAN Convention Against Trafficking in Persons*) berperan dalam penyelesaian kasus perdagangan manusia yang melibatkan penyalahgunaan teknologi. ACTIP berperan sebagai instrument hukum regional untuk memastikan pemerataan penyelenggaraan hukum dan sebagai pelindung bagi korban dari perdagangan manusia untuk mendapatkan keadilannya. ACTIP memiliki peran yang penting dalam mempererat jalinan kerjasama antara negara anggota ASEAN dalam hal penyelarasan pikiran mengenai kebijakan hukum yang berlaku dalam mengatasi kasus perdagangan manusia. ACTIP berperan dalam melakukan standarisasi undang-undang yang berlaku agar menciptakan keselarasan dalam penegakan hukum. Peran yang dilakukan oleh ACTIP menunjukkan komitmen terhadap kasus perdagangan manusia dalam hal penegakan hukum, perlindungan korban, penyelarasan kebijakan, serta menjadi tujuan yang ingin dicapai yaitu memberantas tindak kejahatan perdagangan manusia. Kehadiran ACTIP bermanfaat bagi negara-negara anggota untuk ikut berperan aktif dalam memberantas segala tindak kejahatan transnasional yang telah merugikan

³¹ Felix Ferdin Bakker, Andhika Parama Putra, and Respati Triana Putri, "The Role of ASEAN in Tackling the Main Issues of Transnational Crime in the Southeast Asia Region," *Journal of Law and Border Protection* 2, no. 1 (2020): 47–58, <https://doi.org/10.52617/jlbp.v2i1.182>.

kedaulatan negara-negara. Dalam melaksanakan perannya, ACTIP mengimplementasi hal-hal yang terdapat di dalam protokol Palermo. Protokol ini berperan dalam pencegahan, memberlakukan hukuman bagi pelaku, serta menekan aksi perdagangan manusia.³²

Pada tahun 2022, perwakilan AICHR dari Indonesia serta dihadiri oleh 7 negara anggota ASEAN menghadiri sebuah diskusi dialog. ASEAN berperan dalam mengatur terselenggaranya dialog terbuka yang ditangani oleh AICHR dalam membahas kasus yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia di dalam kawasan Asia Tenggara. Selain itu, diskusi ini dihadiri oleh *the South East Asia National Human Rights Institution Forum* (SEANF). Forum ini merupakan forum yang membahas mengenai hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara yang disahkan melalui deklarasi penandatanganan deklarasi yang dilaksanakan di Bali pada tahun 2007. Penandatanganan deklarasi ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai negara di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Dengan adanya forum ini, AICHR kemudian melakukan kerjasama dengan SEANF untuk menghadapi tantangan dalam perkembangan kejahatan HAM yang terdapat di Asia Tenggara melalui dialog. Adapun dialog yang diperbincangkan mengenai berbagai kebebasan individu, isu ekonomi dan digital dalam HAM, pekerja migran di perbatasan, dan perkembangan kapasitas sumber daya manusia serta hak asasi manusia. Melalui pembahasan dari dialog antara AICHR dan SEANF, terdapat peran yang terdapat pada AICHR. Adapun peran AICHR ialah sebagai pendorong dalam melaksanakan diskusi dalam kemajuan dan meningkatkan perlindungan terhadap HAM di Asia Tenggara serta menindaklanjuti kebijakan pada saat COVID-19.³³

Pada tahun 2023, dialog mengenai HAM terus berlanjut pada pertemuan ke-37 AICHR di Bali pada Mei 2023. Pada pertemuan tersebut, terdapat agenda Indonesia yaitu *ASEAN 2023 on ASEAN Matters: Epicentrum of Growth*. Dalam pembahasan tersebut difokuskan terhadap penguatan peran

³² Iskandar and Nursiti, "Peran Organisasi Internasional Dan Regional Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang Di Indonesia."

³³ KOMNAS HAM, "Komnas HAM Perkuat Kolaborasi Institusi HAM Asia Lewat Dialog," 2022, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/6/22/2166/komnas-ham-perkuat-kolaborasi-institusi-ham-asia-lewat-dialog.html>.

AICHR dalam melakukan perlindungan dan memajukan HAM melalui dialog yang telah diselenggarakan tersebut. AICHR berperan dalam memperkuat kerjasama dan menyatukan pemikiran antar negara anggota dalam menghadapi tantangan permasalahan kejahatan transnasional khususnya perdagangan manusia yang telah berkembang modus penipuannya dalam hal penyalahgunaan teknologi. Peran AICHR dalam mempromosikan kelancaran dalam penegakan hak asasi manusia melalui dialog dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat ASEAN ataupun melalui berbagai forum internasional merupakan bukti bahwa penguatan kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan perkembangan kejahatan transnasional harus dihadapi bersama. Melalui Forum Lembaga HAM Nasional Asia Tenggara (SEANF), AICHR bertemu dengan enam lembaga yaitu (KOMNAS HAM), Malaysia (SUHAKAM), Myanmar (MNHRC), Filipina (CHRP), Thailand (NHRCT), dan *Provedoria dos Direitos Humanos e Justica* (PDHJ) Timor-Leste.³⁴

3. KESIMPULAN

Badan khusus yang dibentuk oleh ASEAN memiliki fokus penanganan seperti penegakan hukum yang merupakan fokus dari ACTIP dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Selain itu, pemerintah Indonesia telah menyatakan perang terhadap aksi perdagangan manusia pada penggelaran KTT ASEAN 2023 yang dilaksanakan di Labuan Bajo. Dalam menangani perdagangan manusia, Indonesia bekerja sama dengan negara lain dalam pertemuan SOMTC untuk membahas langkah efektif terhadap pencegahan kasus perdagangan manusia berbasis *online scam*. Melalui peran AMMTC dan SOMTC terdapat *working group* yaitu *Bohol work plan 2.0* dalam menangani kasus ini.

³⁴ Antara News, "Indonesia Akan Pimpin Diskusi HAM Dalam Pertemuan Ke-37 AICHR."

REFERENSI

- Afriyansyah Renaldi et.al. "Upaya Asean Dalam Mengatasi Human Trafficking Di Regional Asean (Studi Kasus: Perdagangan Perempuan Dan Anak)." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Humaniora* Volume 2 (2022): 223–30.
<http://www.pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/252/230>.
- AICHR. "About AICHR Structure, Work and History of the AICHR," n.d.
<https://aichr.org/about-aichr-2/>.
- Antara News. "Indonesia Akan Pimpin Diskusi HAM Dalam Pertemuan Ke-37 AICHR," 2023.
[https://www.antarane.ws.com/berita/3547842/indonesia-akan-pimpin-diskusi-ham-dalam-pertemuan-ke-37-aichr#:~:text=Jakarta \(ANTARA\) - Indonesia akan memimpin Pertemuan,Indonesia akan memimpin pembahasan penguatan peran AICHR.](https://www.antarane.ws.com/berita/3547842/indonesia-akan-pimpin-diskusi-ham-dalam-pertemuan-ke-37-aichr#:~:text=Jakarta (ANTARA) - Indonesia akan memimpin Pertemuan,Indonesia akan memimpin pembahasan penguatan peran AICHR.)
- asean.org. "ASEAN Multi-Sectoral Work Plan Against Trafficking in Persons 2023-2028 ('Bohol TIP Work Plan 2.0')," no. August (2023): 2.
- Bab IV. "Laporan Penipuan Jual Beli Online Yogyakarta." *Respositori UMY*, 2017.
http://repository.umi.ac.id/bitstream/handle/123456789/23084/BAB_IV.pdf?sequence=8&isAllowed=y.
- Bakker, Felix Ferdin, Andhika Parama Putra, and Respati Triana Putri. "The Role of ASEAN in Tackling the Main Issues of Transnational Crime in the Southeast Asia Region." *Journal of Law and Border Protection* 2, no. 1 (2020): 47–58. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v2i1.182>.
- BBC News Indonesia. "Kami Harus Menunggu Berapa Tahun Lagi Untuk Pulang?' - WNI Korban Perdagangan Orang Menanti Langkah Konkret ASEAN," 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c6pw3ddlnl2o>.
- Blue Campaign. "What Is Human Trafficking?" United States of America, 2022. <https://www.dhs.gov/blue-campaign/what-human-trafficking>.
- Budiono Eko. "Urgensi ASEAN Berantas Perdagangan Manusia," 2023.

<https://www.infopublik.id/kategori/asean-2023/739262/urgensi-asean-berantas-perdagangan-manusia>.

Humas Kemensetneg RI. “Indonesia Dorong Penguatan Menyeluruh Penanggulangan Perdagangan Orang Di KTT Ke-42 ASEAN 2023,” 2023. https://www.setneg.go.id/baca/index/indonesia_dorong_penguatan_menyeluruh_penanggulangan_perdagangan_orang_di_ktt_ke_42_asean_2023.

Iskandar, Iskandar, and Nursiti Nursiti. “Peran Organisasi Internasional Dan Regional Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang Di Indonesia.” *Jurnal HAM* 12, no. 3 (2021): 385. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.385-404>.

Jakarta, Sekretariat ASEAN. *AICHR: Apa Yang Perlu Anda Ketahui – Edisi Ulang Tahun ASEAN Ke-50, Sebuah Ikhtisar*, 2017. https://aichr.org/wp-content/uploads/2020/02/AICHR_What_You_Need_to_Know_Compendum_Indonesia_FINAL_Revised-compressed.pdf.

“Kami Harus Menunggu Berapa Tahun Lagi Untuk Pulang?” - WNI Korban Perdagangan Orang Menanti Langkah Konkret ASEAN,” 2023. [https://www.bbc.com/indonesia/articles/c6pw3ddlnl2o#:~:text=ASEAN “seperti macan kertas”,dan investasi bodong di Kamboja](https://www.bbc.com/indonesia/articles/c6pw3ddlnl2o#:~:text=ASEAN%20%22seperti%20macan%20kertas%22,dan%20investasi%20bodong%20di%20Kamboja).

KOMNAS HAM. “Komnas HAM Perkuat Kolaborasi Institusi HAM Asia Lewat Dialog,” 2022. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/6/22/2166/komnas-ham-perkuat-kolaborasi-institusi-ham-asia-lewat-dialog.html>.

Kuldeep Singh Chauhan. “ASEAN Leaders Tackle Human Trafficking at Latest Summit,” 2023. [https://thediplomat-com.translate.goog/2023/05/asean-leaders-tackle-human-trafficking-at-latest-summit/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge#:~:text=Untuk memastikan implementasi yang efektif,teknologi dalam konteks perdagangan manusia](https://thediplomat-com.translate.goog/2023/05/asean-leaders-tackle-human-trafficking-at-latest-summit/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge#:~:text=Untuk%20memastikan%20implementasi%20yang%20efektif,teknologi%20dalam%20konteks%20perdagangan%20manusia).

Narin Sun. “Dunia Desak Kamboja Benahi Kasus Perdagangan Manusia Dan Penipuan Jaringan China,” 2022. <https://www.voaindonesia.com/a/dunia-desak-kamboja-benahi-kasus->

perdagangan-manusia-dan-penipuan-jaringan-china/6734505.html.

NCB Interpol Indonesia. "ASEAN MINISTERIAL MEETING ON TRANSNATIONAL CRIME (AMMTC) KE-17," 2023. <https://interpol.go.id/berita38.php#:~:text=Sebagai pemegang keketuaan ASEAN tahun,atau lintas negara di Kawasan.>

Nurul Fajriah. "Peran ASEAN Dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia Di Kawasan Asia Tenggara," 2022, 15.

Pramudyani Difa. "Urgensi ASEAN Berantas Perdagangan Manusia Dalam Kasus 'Online Scams,'" 2023. <https://www.antaraneews.com/berita/3531606/urgensi-asean-berantas-perdagangan-manusia-dalam-kasus-online-scams.>

Pyramid Healthcare. "Dampak Perdagangan Manusia Terhadap Kesehatan Mental Dan Fisik," 2024. [https://www.pyramid-healthcare.com/the-mental-and-physical-health-effects-of-human-trafficking/.](https://www.pyramid-healthcare.com/the-mental-and-physical-health-effects-of-human-trafficking/)

Sekretariat Nasional ASEAN. "Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara," 2017. [https://setnasasean.id/pilar-politik-dan-keamanan#:~:text=Peran ASEAN dalam mencapai stabilitas,\(non-interference\) dalam politik %0A%0A.](https://setnasasean.id/pilar-politik-dan-keamanan#:~:text=Peran ASEAN dalam mencapai stabilitas,(non-interference) dalam politik %0A%0A.)

———. "Portal Utama ASEAN," 2024. [https://asean.org/asean-charter/.](https://asean.org/asean-charter/)

———. "THE ASEAN SENIOR OFFICIALS MEETING ON TRANSNATIONAL CRIME (SOMTC) WORK PROGRAMME TO IMPLEMENT," 2022.

Team, ASEAN Secretariat. "Pernyataan Bersama Pada Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN Ke-16 Tentang Kejahatan Transnasional (AMMMC Ke-16)." *Website Resmi Sekretariat ASEAN*, no. September (2022): 1–3. [https://asean.org/joint-statement-sixteenth-asean-ministerial-meeting-on-transnational-crime-16th-ammtc/.](https://asean.org/joint-statement-sixteenth-asean-ministerial-meeting-on-transnational-crime-16th-ammtc/)

"Tentang AICHR," 2023. <https://setnasasean.id/asean-intergovernmental-commission-on-human-rights-aichr.>

Tim multimedia Fakultas Hukum UAJY. "Firtual: Forum Literasi Hukum Dan HAM Digital (Firtual) Dengan Tema Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Melalui Online Scamming," 2023. <https://fh.uajy.ac.id/berita/firtual-forum-literasi-hukum-dan-ham-digital-firtual-dengan-tema-pencegahan-dan-penanganan-tindak->

pidana-perdagangan-orang-tpo-melalui-online-scamming.

UNODC. "Human Trafficking and Migrant Smuggling," n.d.
<https://sherloc.unodc.org/>.

Waranggani Arundati. "Ini 3 Faktor Yang Menjadi Penyebab Kejahatan Siber Mudah Terjadi," 2021. <https://www.cloudcomputing.id/berita/3-faktor-penyebab-kejahatan-siber>.

Wendy, Prajuli Andhika, ed. *Memahami ASEAN Sebuah Pengantar*. Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.

Yunda, Anggie. "Upaya Indonesia Dalam Menanggulangi Kasus Human Trafficking Di Selat Malaka." *Padjadjaran Journal of International Relations* 1, no. 3 (2020): 176.
<https://doi.org/10.24198/padjir.v1i3.26192>.